

PERANAN BIROKRASI PEMERINTAH TERHADAP KINERJA APARATUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Hendra Anda

hendraanda@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan Peranan birokrasi pemerintah terhadap kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang sudah terlaksana dengan baik 65,18% dilihat dari indikator pembagian kerja, disiplin dan pengawasan, sistem aturan yang sistematis, jabatan mengikuti asas hirarki, pejabat terikat pada satu tugas formal, syarat-syarat teknis dan jabatan merupakan karier kurang berkualitas karena tidak sesuai dengan bidang dan pekerjaan yang dia kerjakan sedangkan dilihat dari kinerja pelayanan aparatur terlaksana dengan baik 67,75% dengan indikator kesetiaan, prestasi kerja, kedisiplinan, kerja sama, kecakapan dan tanggung jawab sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan birokrasi pemerintah terhadap kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu upaya reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang kurang baik 48,67% dilihat dari indikator kualitas pekerjaan, Kuantitas pekerjaan dan ketepatan waktu.

Kata Kunci : Peranan dan Kinerja

Abstract

The results showed that the role of the government bureaucracy on the performance of the Civil Service Police Unit of Sidenreng Rappang Regency had been carried out well 65.18% seen from the indicators of division of labor, discipline and supervision, a systematic system of rules, positions following the principle of hierarchy, officials bound to one formal task, technical requirements and positions are low-quality careers because they are not in accordance with the field and work he is doing, while judging from the performance of the service apparatus, 67.75% are carried out with indicators of loyalty, work performance, discipline, cooperation, skills and responsibilities while the factors that influence the role of the government bureaucracy on the performance of the Civil Service Police Unit apparatus of Sidenreng Rappang Regency are bureaucratic reform efforts that have been carried out at the Civil Service Police Unit Office of Sidenreng Rappang Regency are not good 48.67% seen from the quality of work indicators, Quantity of work and timeliness.

Keywords: Role and Performance

A. PENDAHULUAN

Birokrasi di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (termasuk penyelenggaraan pelayanan publik) diberi kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit apabila masyarakat menyelesaikan urusannya berkaitan dengan pelayanan aparatur pemerintahan. Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang tidak menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri (khususnya dalam hal pelayanan publik). Birokrasi tidak dapat lagi menempatkan diri sebagai sosok institusi yang angkuh dan tak tersentuh oleh kritik dari pihak luar birokrasi. Tuntutan masyarakat mengenai perlunya dilakukannya perbaikan kualitas pelayanan publik telah menjadi wacana publik sampai dengan saat ini. Disamping itu, semakin isu demokratisasi memperkuat posisi masyarakat untuk menuntut hak-hak mereka ketika berhubungan dengan birokrasi. Dalam konteks yang demikian, birokrasi publik perlu merevitalisasi diri agar mampu meningkatkan kinerja pegawai.

Banyak perangkat daerah kabupaten Sidrap, terdapat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidrap yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 148 ayat (1) dimana tugas pokoknya adalah membantu dalam penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban terhadap masyarakat serta penegakan peraturan daerah. Suksesnya pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat sangat ditentukan oleh peran seorang pemimpin dan kepemimpinannya yang handal, berwibawa, bertanggung jawab, tegas dan bijak dalam menghadapi setiap permasalahan, serta memiliki kemampuan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat serta menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut agar dapat secara konsisten mendukung pencapaian tujuan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku pimpinan institusi haruslah memiliki kemampuan dalam memahami masalah dan tantangan yang secara nyata dihadapi. Mengingat berbagai masalah sosial - ekonomi yang berkembang di masyarakat yang menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum akibat kurangnya kesadaran dan ketidaktaatan

warga untuk mematuhi peraturan daerah atau keputusan kepala daerah seperti keberadaan dan kegiatan pedagang kaki lima (PKL) pada area public space, usaha-usaha yang diadakan dijalur hijau, bangunan yang tidak didasari dengan IMB, melakukan kegiatan usaha tanpa disertai SITU atau tidak membayar pajak yang berimplikasi pada tidak tercapainya pemasukan PAD, reklame liar, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan lain-lain mengakibatkan gangguan terhadap kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di daerah. Hal-hal tersebut adalah cerminan bahwa kesadaran hukum dan masyarakat tersebut masih rendah dan tentunya perlu ditangani secara bijak dengan melakukan berbagai program atau usaha-usaha untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum seperti kegiatan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum (peraturan daerah dan keputusan kepala daerah) kepada masyarakat, kunjungan pengawasan atau pemantauan, serta operasi penertiban jika terdapat penyimpangan terhadap peraturan daerah yang berlaku. Program-program tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar memahami pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah sehingga mereka sadar akan kewajibannya sebagai warga negara.

Usaha memberikan pembinaan (penyuluhan perda) kepada masyarakat, Kasatpol PP hendaknya menggunakan pendekatan persuasif dan menghindari adanya tindakan arogan atau kekerasan, serta memegang prinsip koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan di lapangan. Akan tetapi, menurut pengamatan sementara yang penulis peroleh, ada fenomena yang nampak bahwa persepsi masyarakat terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidrap cenderung bersifat otoriter (semi militer), mengingat tantangan tugas dan permasalahan yang dihadapi semakin berat dan kompleks dimana banyaknya perlawanan dari anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sehingga Kasatpol PP tegas dalam menerapkan sanksi bagi para pelanggar perda dan menuntut kedisiplinan dan peningkatan kinerja dari para personilnya untuk mengatasi permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Birokrasi pemerintahan, dengan merujuk teori Weber, dalam Ahmad (2011 : 17) mementahkan beberapa karakteristik birokrasi sebagai berikut :

1. Lingkup kewenangan berdasarkan pembagian kerja yang sistematis.
2. Pejabat terikat pada disiplin dan pengawasan yang ketat dan sistematis dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.
3. Semua kegiatan diatur oleh sistem aturan yang sistematis.
4. Jabatan mengikuti asas hirarki.
5. Pejabat hanya terikat pada satu tugas formal dan tidak personal.
6. Jabatan diisi berdasarkan terpenuhi syarat-syarat teknis yang dinyatakan melalui ujian dan ijasah. Pejabat bersangkutan diangkat dan bukan dipilih.
7. Jabatan itu merupakan karier artinya ada sistem kenaikan tingkat berdasarkan waktu dan kecakapan.

Hasibuan (2005:56) dalam bukunya mengungkapkan bahwa kinerja pelayanan dapat dikatakan baik atau dinilai baik dari beberapa hal:

1. Kesetiaan diukur dari kesetiaan pegawai terhadap pelaksanaan tugas secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan organisasi.
2. Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya baik kualitas maupun kuantitas menjadi tolak ukur. Pada umumnya prestasi kerja seorang pegawai dipengaruhi oleh, kecakapan, ketrampilan, pengalaman dan kesanggupan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Kedisiplinan berarti sejauh mana pegawai dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan melaksanakan instruksi yang diberikan kepadanya.;
4. Kerja sama diukur dari kemampuan pegawai untuk bekerja sama dengan pegawai lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga hasil pekerjaannya akan semakin baik;
5. Kecakapan diukur dari ketrampilan dan kecakapan pegawai dalam menyelesaikan tugas ;
6. tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada

waktunya serta berani memikul resiko pekerjaan yang dilakukan.

Menurut Darma (2005 : 24) mengatakan bahwa hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
2. Kualitas, adalah mutu yang dihasilkan. Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran tingkat "kepuasan", yakni seberapa baik penyelesaiannya.
3. Ketepatan waktu, adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus penyelesaian suatu kegiatan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif yaitu data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 37 orang, Sedangkan sampel yaitu sampel jenuh dengan mengambil keseluruhan populasi yang berjumlah 37 orang pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Birokrasi pemerintahan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini :

1. Lingkup kewenangan berdasarkan pembagian kerja yang sistematis. Pelayanan publik di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidenreng Rappang dinilai tidak adil karena hampir seluruh pekerjaan diberikan kepada tenaga honorer sedangkan banyak PNS menggunakan waktunya untuk bersantai (baca surat kabar dan main game).
2. Pejabat terikat pada disiplin dan pengawasan yang ketat dan sistematis dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Disiplin dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan tugas jabatannya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidenreng

Rappang tidak disiplin karena masih ditemukan pegawai yang terlambat masuk kerja sehingga pelayanan terhambat.

3. Semua Kegiatan diatur oleh sistem aturan yang sistematis. Semua kegiatan diatur oleh sistem aturan yang sistematis di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidenreng Rappang sangat bagus untuk mempermudah pekerjaan.
4. Jabatan-jabatan mengikuti asas hirarki. Penempatan jabatan mengikuti asas hirarki di Kantor Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidenreng Rappang dinilai baik kalau jenjang jabatan mulai dari bawah keatas (Staf hingga atasan).
5. Pejabat hanya terikat pada satu tugas formal dan tidak personal. Sebaiknya pejabat jangan hanya terikat pada satu tugas formal dan harus personal terhadap semua pekerjaan yang akan dikerja.
6. Jabatan diisi berdasarkan terpenuhi syarat-syarat teknis yang dinyatakan melalui ijasah pegawai bersangkutan diangkat dan bukan dipilih. Pengisian jabatan sebaiknya melihat ijasah agar pegawai bisa bekerja secara profesional.
7. Jabatan itu merupakan karier artinya ada sistem kenaikan tingkat berdasarkan waktu dan kecakapan. Sistem kenaikan tingkat berdasarkan waktu dan kecakapan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidenreng Rappang sebaiknya diperhatikan karena selama sistem kenaikan tingkat dan kecakapan pegawai tidak berdasarkan kesenioran hanya berdasarkan unsur pendekatan kolusi dan Nepotisme.

Kinerja pelayanan yaitu hasil yang dicapai institusi dalam melaksanakan aktivitas pelayanan. Indikator Kinerja pelayanan diukur adalah kesetiaan, prestasi kerja, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab.

1. Kesetiaan. Sebagian besar menilai baik terhadap Pegawai dalam melaksanakan aktivitas pelayanan dilakukan secara sungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahwa konstruk pernyataan aktivitas pelayanan dilakukan secara sungguh-sungguh dan selalu, memberikan kontribusi dalam membangun indikator kesetiaan.
2. Prestasi Kerja. Sebagian besar menilai baik terhadap Proses pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa sesuai standar yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa proses pelayanan kepada masyarakat

pengguna jasa sesuai standar yang ditetapkan, memberikan kontribusi dalam membangun indikator prestasi kerja.

3. Kedisiplinan. Sebagian besar menilai baik dalam menjalankan tugas pelayanan berdasarkan prosedur kerja. Ini menunjukkan bahwa proses dalam menjalankan tugas pelayanan berdasarkan prosedur kerja memberikan kontribusi dalam membangun indikator kedisiplinan.
4. Kerja Sama. Sebagian responden mengatakan baik, karena pegawai dalam melaksanakan aktivitas pelayanan selalu bekerja sama dengan rekan kerja. Ini menunjukkan koordinasi yang dilakukan pegawai dan bekerja sama dengan rekan kerja, memberikan kontribusi dalam membangun indikator kerja sama.
5. Kecakapan. Sebagian besar menilai baik karena setiap ada permasalahan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) cepat penanganannya. Ini menunjukkan bahwa konstruk pernyataan setiap ada permasalahan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) cepat penanganannya dan memberikan kontribusi dalam membangun indikator kecakapan pegawai.
6. Tanggung Jawab. Sebagian besar menilai baik karena Pegawai selalu bertanggung jawab terhadap tugas telah telah dibebankan. Ini menunjukkan bahwa konstruk pernyataan pegawai selalu bertanggung jawab terhadap tugas telah telah dibebankan, memberikan kontribusi dalam membangun indikator tanggung jawab.

Faktor-faktor Yang Memengaruhi Peranan Birokrasi Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

1. Kualitas Pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara, kualitas akan proses perekrutan pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan maksimal alasannya ada pegawai yang ditempatkan diposisi di mana mereka tidak menguasai bidang yang mereka duduki karena adanya budaya nepotisme yang sulit untuk dihilangkan. Secara tidak langsung hal ini dapat berdampak buruk terhadap kualitas pekerjaan dalam organisasi yang bersangkutan dan secara umum kinerja organisasi pun terpengaruh.

2. Kuantitas Pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa di Kabupaten Sidenreng Rappang terkhusus di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidenreng Rappang antara jumlah pegawai dengan banyaknya pekerjaan masih belum seimbang. Ketidakseimbangan ini terjadi karena adanya praktek nepotisme yang dilakukan oleh sebagian dari pegawai yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya ketidakseimbangan tersebut, dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Ketepatan Waktu. Ketepatan waktu ini juga merupakan salah satu faktor suatu pekerjaan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Berkaitan dengan hal itu, dalam suatu organisasi harus kita ketahui bagaimana suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh para pegawai dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya maka hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan birokrasi pemerintah terhadap kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sidenreng Rappang sudah terlaksana dengan baik (65,18%) dilihat dari indikator pembagian kerja, disiplin dan pengawasan, sistim aturan yang sistimatis, jabatan mengikuti asas hirarki, pejabat terikat pada satu tugas formal, syarat-syarat teknis dan jabatan merupakan karier kurang berkualitas karena tidak sesuai dengan bidang dan pekerjaan yang dia kerjakan sedangkan dilihat dari kinerja pelayanan aparatur terlaksana dengan baik (67,75%) dengan indikator kesetiaan, Prestasi kerja, Kedisiplinan, Kerja sama, Kecakapan dan Tanggung jawab.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan birokrasi pemerintah terhadap kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu upaya reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidenreng Rappang kurang baik (48,67) dilihat dari indikator kualitas

pekerjaan, Kuantitas pekerjaan dan ketepatan waktu.

E. REFERENSI

- Ahmad, J. (2011). *Prilaku birokrasi dan Pengambilan Keputusan*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Albrow, M. (2005). *Birokrasi Yogyakarta*. Yogyakarta.: Tiara Wacana, .
- Alwi, S. (2001.). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta. : BPFE.
- As'ad, M. (2001). *Psikologi Industri*. Yogyakarta: Liberty.
- Darma, A. (2005). *Manajemen Pertiaksi Kerja, Cetakan 5*. Jakarta: Rajawali.
- Dwiyanto, A. (2002.). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gibson, e. a. (2006.). *Organisasi dan Manajemen, Edisi ke-lima*., Jakarta: Erlangga .
- Handoko, T. H. (2000.). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi II*, . Jakarta. : Salemba Empat.
- Malayu, H. S. (2005.). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. . Jakarta.: Bumi Aksara, .
- Mangkunegara, A. P. (2007.). *Evaluasi Kinerja*. . Bandung: Refika Aditama. .
- Ndara, T. (2003). *Kybernetology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 2* . Jakarta : Rineka Cipta.
- Rivai, V. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sastrohamidjojo., H. (2005.). *Spektroskopi*. Yogyakarta: Liberty.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*.
Jakarta: Gramedia Widya Pustaka
Utama.